

LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu atas target kinerja dan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Dengan harapan laporan kinerja ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif, dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2019 dan menjadi acuan yang berkesinambungan dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah. Masukkan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Putussibau, 28 Januari 2020
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu

Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19650507 199803 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama tahun 2019 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2017-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019 memiliki sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator. Realisasi target kinerja menunjukkan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2019 dikategorikan sangat berhasil. Diharapkan capaian kinerja pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	28
A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	28
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	30
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
1. Pengukuran Kinerja	
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV : PENUTUP	46
LAMPIRAN :	
1. Pengukuran Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik	
2. Perjanjian Kinerja 2019	
3. Buku Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019	
4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019	
5. Hasil Penilaian IKM dari Pihak Akademis PDD Politeknik Negeri Pontianak di Kab. Kapuas Hulu Bekerja sama dengan Bagian Organisasi Pemerintahan	
6. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Golongan dan Eselon berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Utama	10
Tabel 1.3	Nama Domain dan Sub Domain OPD Kabupaten Kapuas Hulu	13
Tabel 1.4	Nama Domain Website Desa	15
Tabel 1.5	Data Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) Bantuan Dari Kementerian	19
Tabel 1.6	Data Pembangunan Jaringan Akses Internet Bantuan Dari Kementerian	20
Tabel 1.7	Data Media Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2019	30
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran	34
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	35
Tabel 3.5	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)	36
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	38
Tabel 3.8	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan data statistic sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	39
Tabel 3.10	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	39
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)	40
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Tidak Langsung	41
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Langsung	42
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2017-2021, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dan digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk tahun-tahun berikutnya, karena tahun 2019 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) 2017-2021, maka pada laporan kinerja tahun 2019 akan dianalisis sebagai capaian awal atau pondasi dalam rangka mencapai target Renstra tahun 2017-2021.

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Pelaporan ini dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran 2019 yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang disusun pada awal tahun. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran serta target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017-2021.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2019.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

b. Fungsi Kepala Dinas

1. Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan instansi lainnya;
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.
- b. Fungsi:
 1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
 3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;

7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat, dibantu oleh Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Aparatur.

2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan program kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas. Sub Bagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur ;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur dinas;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaantugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- c. Pembinaan komunikasi dan media publik;
- d. Pengelolaan informasi publik;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;

- f. Pengevaluasian pelaksanaan seksi-seksi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1. Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik

Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan komunikasi dan media publik. Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Komunikasi dan Media Publik;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaankomunikasi dan media publik;
- c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. Penyediaan akses informasi di kabupaten;
- f. Pembinaan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi

Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dan informasi publik dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik. Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
- d. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. Pelayanan informasi publik;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Statistik dan Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- c. pelaksanaan statistik sektoral;
- d. pengelolaan aplikasi informatika;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1. Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan statistik sektoral. Dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan statistik sektoral;
- d. pemberian dukungan survei skala nasional di tingkat kabupaten;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik; dan
- f. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Aplikasi Informatika

Kepala Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aplikasi informatika. Kepala Seksi Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. pengelolaan nama domain serta pengelolaan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah;
- d. pemberdayaan informatika meliputi *data center*, *disaster recovery center*, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pengembangan internet dan penggunaan akses internet pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten;
- e. pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan di kabupaten;

- f. pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di kabupaten serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Aplikasi Informatika; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah dan kualitas SDM merupakan salah satu elemen penting dalam suatu organisasi sebagai penentu keberhasilan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			K e t
			I	II	III	IV	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	3	-	1	2	-	-	-	-	-
4.	SARJANA MUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SARJANA	10	-	-	9	1	-	-	6	-
6.	PASCA SARJANA	4	-	-	1	3	1	3	-	-
Jumlah		17	-	1	12	4	1	3	6	-

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) yang berjumlah 2 orang dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 13 orang yang termasuk penyiar LPPL Rasika-FM.

1.3. SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019.

1.4. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang optimalisasi pekerjaan, perlu adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana utama yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Sarana dan Prasarana utama selain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	3	Baik
2	Mobil	2	1 Rusak/ 1 Baik
3	Sepeda Motor	6	Baik

4	Komputer	6	Baik
5	NoteBook / Laptop	17	Baik
6	Faximille	2	rusak
7	Televisi	3	2 Baik/ 1 rusak
8	Kamera Digital	3	Baik
9	Genset	1	Baik
10	Meja Kerja	19	Baik
11	Kursi Kerja	20	Baik
12	Lemari Arsip	8	Baik
13	Air Conditioner (AC)	9	Baik
14	Camcoder	2	Baik
15	Printer	10	Baik
16	Kursi tamu	4	baik
17	drone	1	baik

C. PERMASALAHAN UTAMA (ISSUE STRATEGIS)

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Permasalahan Utama (issue Strategis) yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan layanan tugas pokok dan fungsi, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas Hulu sampai Tahun 2019

Dalam pengelolaan website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selalu memberikan informasi yang *up to date* baik berita maupun informasi yang lainnya. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah mengelola 1 (satu) Domain Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, 25 (dua puluh lima) Subdomain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 15 (lima belas) subdomain lembaga, layanan publik dan kegiatan jadi total keseluruhan domain dan subdomain yang di kelola **sebanyak 41 (empat puluh satu) domain dan subdomain**. Serta hasil monitoring website desa.id di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat **28 (dua puluh delapan) Website Desa**.

pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas dalam monitoring dan evaluasi penggunaan domain dan subdomain masih banyak Kecamatan dan Desa belum memiliki website resmi, salah satu yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan website diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perangkat pendukung seperti Laptop dan jaringan akses internet. Adapun daftar nama domain, subdomain lembaga, layanan publik dan kegiatan dan website desa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
DAFTAR NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN BAGI LEMBAGA, PELAYANAN PUBLIK
DAN KEGIATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
(Keadaan per 31 Desember 2019)

a. Nama Domain Website Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	NAMA DOMAIN	PENGELOLA
1	www.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
JUMLAH		1

1. Nama Subdomain Website OPD

NO.	NAMA SUBDOMAIN OPD	PENGELOLA
1	www.p2.setda.kapuashulukab.go.id	Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas hulu
2.	www.dprd.kapuashulukab.go.id	Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
3.	www.dinkes.kapuashulukab.go.id	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
4.	www.diporapar.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
5.	www.dukcapil.kapuashulukab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
6.	www.diskominfo.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
7.	www.disperpusip.kapuashulukab.go.id	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu
8.	www.disciptakarya.kapuashulukab.go.id	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
9.	www.diskup.kapuashulukab.go.id	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu
10.	www.lingkungan hidup.kapuashulukab.go.id	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu
11.	www.bappeda.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kapuas Hulu
12.	www.disbinamarga.kapuashulukab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu



13.	www.dpmpstsp.kapuashulukab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
14.	www.diskan.kapuashulukab.go.id	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
15.	www.disnakertrans.kapuashulukab.go.id	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
16.	www.pemasdes.kapuashulukab.go.id	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu
17.	www.inspektorat.kapuashulukab.go.id	Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
18.	www.dishub.kapuashulukab.go.id	Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
19.	www.bkpsdm.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
20.	www.bkd.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
21.	www.dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22.	www.distanpangan.kapuashulukab.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
23.	www.disdikbud.kapuashulukab.go.id	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
24.	www.bppd.kapuashulukab.go.id	Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
25.	www.satpolpp.kapuashulukab.go.id	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
JUMLAH		25

2. Nama Subdomain Lembaga, Layanan Publik Dan Kegiatan

NO.	NAMA SUBDOMAIN LEMBAGA, LAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN	PENGELOLA
1.	www.jdih.kapuashulukab.go.id	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2.	www.lpse.kapuashulukab.go.id	Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3.	www.ppid.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
4.	www.fds.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
5.	www.geoportal.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6.	www.cloud.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

7.	www.smep.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengendalian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
8.	www.simbaja.kapuashulukab.go.id	Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
9.	www.siak.kapuashulukab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
10.	www.sakip.kapuashulukab.go.id	Bagian Organisasi Pada Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu
11.	www.info.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
12.	www.sirala.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
13.	www.siipro.kapuashulukab.go.id	Bagian Hubungan masyarakat dan Protokol Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
14.	www.ekinerja.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
15.	www.rsudadp.kapuashulukab.go.id	RSUD dr. Achmad Diponegoro
JUMLAH		15

3. Tabel. 1.4 Nama Domain Website DESA.ID

NO.	NAMA DOMAIN DESA.ID	PENGELOLA / DESA	KECAMATAN
1	www.miaumerah.desa.id	Miau Merah	Silat Hilir
2	www.sungaiantu.desa.id	Sungai Antu	Puring Kencana
3	www.semitauhulu.desa.id	Semitau Hulu	Semitau
4	www.kenerak.desa.id	Kenerak	Semitau
5	www.tunasmuda.desa.id	Tunas Muda	Hulu Gurung
6	www.tanimakmur.desa.id	Tani Makmur	Hulu Gurung
7	www.simpangsenara.desa.id	Simpang Senara	Hulu Gurung
8	www.mubung.desa.id	Mubung	Hulu Gurung
9	www.mentawit.desa.id	Mentawit	Hulu Gurung
10	www.kelakar.desa.id	Kelakar	Hulu Gurung
11	www.sriwangi.desa.id	Sri Wangi	Boyan Tanjung
12	www.nangajemah.desa.id	Nanga Jemah	Boyan Tanjung
13	www.nangabetung.desa.id	Nanga Betung	Boyan Tanjung
14	www.boyantanjung.desa.id	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung
15	www.labianiraang.desa.id	Labian Ira'ang	Batang Lupar
16	www.melemba.desa.id	Melemba	Batang Lupar
17	www.senunuk.desa.id	Senunuk	Batang Lupar
18	www.sungaiabau.desa.id	Sungai Abau	Batang Lupar
19	www.setulang-batanglupar.desa.id	Setulang	Batang Lupar
20	www.lanjakderas.desa.id	Lanjak Deras	Batang Lupar
21	www.mensiau.desa.id	Mensiau	Batang Lupar
22	www.sepandan.desa.id	Sepandan	Batang Lupar
23	www.labian.desa.id	Labian	Batang Lupar
24	www.tekalong.desa.id	Tekalong	Mentebah
25	www.marsedanraya.desa.id	Marsedan Raya	Semitau
26	www.beringin.desa.id	Beringin	Hulu Gurung

27	www.sejahteramandiri.desa.id	Sejahtera Mandiri	Hulu Hurung
28	www.teluksindur.desa.id	Teluk Sindur	Bika
JUMLAH			28

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat Presiden yaitu peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan penerapan SPBE diantaranya terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan.

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2018 memiliki nilai **indek SPBE 1,93** dengan predikat **CUKUP**. Sedangkan untuk tahun 2019 hasil evaluasi **Indeks SPBE** Kabupaten Kapuas Hulu mendapat **nilai 2,60** dengan predikat **BAIK** sesuai dengan target yang diinginkan (hasil Indeks SPBE Tahun 2019 terlampir).

Adapun dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak permasalahan diantaranya adalah :

- Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan;
- Tata kelola tidak terpadu;
- Penerapan pelayanan belum optimal;
- Jumlah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE masih terbatas;
- Masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah;
- Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh instansi; dan
- Pengelolaan keamanan informasi lemah di system seluruh instansi pemerintah.

Sehingga dalam pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) menimbulkan dampak system seperti pemborosan biaya, reputasi menurun dan terganggunya pengoperasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan permasalahan diatas dan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maka pimpinan kepala daerah berkewajiban melakukan akselerasi perbaikan pada domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan Sistem Pemerintan Berbasis Elektronik. Salah satu keluaran dari domain kebijakan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-government*).

3. Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Mantra

Interoperabilitas *e-Government* (pemerintahan secara elektronik) saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam system pemerintahan elektronik di Indonesia. Interoperabilitas mutlak diperlukan agar berbagai layanan pemerintah yang terhubung ke jaringan (atau yang lebih dikenal sebagai *e-Service*) dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Adanya komunikasi efektif tentu akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

- a. Belum maksimalnya OPD dalam menyajikan kebutuhan terhadap Sistem Elektronik meliputi ketersediaan, keakuratan dan kecepatan dalam mengolah data dan memperoleh informasi yang berguna dan valid bagi pengambilan keputusan.
- b. Keberagaman platom Sistem Elektronik yang telah dibangun berdasarkan Sistem Operasi, Pemrograman, Database dan Infrastruktur serta Arsitektur yang berbeda.

- c. Terjadinya duplikasi data di setiap instansi pemerintah akibat terjadinya pendataan ulang pada Sistem Elektronik masing-masing. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Interoperabilitas *e-Government* (pemerintahan secara elektronik). Hasil keluaran kegiatan bimbingan teknis aplikasi mantra adalah memberi pemahaman dan pengetahuan penerapan aplikasi mantra dalam mengintegrasikan aplikasi sebanyak 23 peserta.

4. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Program Penyediaan KPU/USO

Mengingat pentingnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan akses internet dalam pemanfaatan perangkat teknologi sebagai kebutuhan baik masyarakat maupun pemerintahan adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. masih banyaknya daerah *blankspot* atau tidak ada sinyal telekomunikasi terutama di dusun atau di Desa-desanya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Minimnya fasilitas jaringan akses internet baik di Kecamatan maupun di Desa-desanya;
- c. Dalam memberikan bantuan jaringan telekomunikasi maupun jaringan akses internet terkadang masih terjadi miskomunikasi antara pihak penyedia dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sementara untuk hasil keluaran kegiatan ini dalam memfasilitasi usulan bantuan jaringan telekomunikasi maupun jaringan akses internet tahun 2019 sebanyak:

- a. Jaringan telekomunikasi / tower BTS sebanyak : **64 lokasi**
- b. Jaringan akses internet sebanyak : **39 Lokasi**

Sedangkan bantuan pembangunan jaringan telekomunikasi dan akses internet tahun 2019 yang di peroleh sebanyak untuk jaringan telekomunikasi (BTS) sebanyak **3 lokasi** dan Akses Internet Sebanyak **14 lokasi**.

Adapun daftar bantuan pembangunan jaringan telekomunikasi dan jaringan akses internet di Kabupaten Kapuas Hulu:

Tabel 1.5

**DATA PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI (BTS)
BANTUAN DARI KEMENTERIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA**
(Keadaan per 31 Desember 2019)

NO.	NAMA SITE / DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TAHUN BANTUAN
1	Sungai Uluk Palin	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2016
2	Lauk	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2016
3	Bungan Jaya	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2016
4	Kereho	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2016
5	Rantau Prapat	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2016
6	Ulak Pauk	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2016
7	Kantuk Asam	Puring Kencana	Kapuas Hulu	2016
8	Pamtas Kantuk Asam	Puring Kencana	Kapuas Hulu	2016
9	Melemba	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2016
10	Sungai Senunuk	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2016
11	Labian	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2016
12	Tani Makmur	Hulu Gurung	Kapuas Hulu	2017
13	Ujung Said	Jongkong	Kapuas Hulu	2017
14	Nanga Lauk	Embaloh Hilir	Kapuas Hulu	2017
15	Nanga Boyan	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu	2017
16	Nanga Jemah	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu	2017
17	Sekubah	Selimbau	Kapuas Hulu	2017
18	Setulang	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2017
19	Pulau Majang	Badau	Kapuas Hulu	2017
20	Riam Tapang	Silat Hulu	Kapuas Hulu	2017
21	Batu Lintang	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2018
22	Menua Sadap	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2018
23	Dusun Mata Lunai, Desa Beringin Jaya	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2018
24	Dusun Nanga Balang, Desa Beringin Jaya	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2018
25	Pamtas Klawik	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2018
26	Nanga Awin	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2018
27	Entibab	Bunut Hilir	Kapuas Hulu	2018
28	Nanga Nyabau	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2019
29	Nanga Luan	Silat Hulu	Kapuas Hulu	2019
30	Nanga Kelibang	Bunut Hulu	Kapuas Hulu	2019
J U M L A H				30



Tabel 1.6
DATA PEMBANGUNAN JARINGAN AKSES INTERNET
BANTUAN DARI KEMENTERIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA
(Keadaan per 31 Desember 2019)

NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LOKASI	TAHUN BANTUAN
1	Sungai Antu	Puring Kencana	Kantor Desa Sungai Antu	2015
2	Putussibau Kota	Putussibau Utara	Media Center Kapuas Hulu	2016
3	Putussibau Kota	Putussibau Utara	SMA Karya Budi Putussibau	2016
4	Hilir Kantor	Putussibau Utara	Madrasah Aliyah Negeri Putussibau	2016
5	Hilir kantor	Putussibau Utara	SMA Muhammadiyah Putussibau	2016
6	Kedamn Hilir	Putussibau Selatan	SMA Negeri 2 Putussibau	2016
7	Kedamin Hulu	Putussibau Selatan	SMA Negeri 2 Putussibau	2016
8	Tanjung Jati	Putussibau Selatan	KIM "Sekilas Info"	2016
9	Tekudak	Kalis	KIM "Nandang Pasulang"	2016
10	Tekalong	Mentebah	KIM "Nandang Tekalong"	2016
11	Sungai Besar	Bunut Hulu	KIM "Ketam Bersatu"	2016
12	Bunut Hulu	Bunut Hulu	Kantor Desa Bunut Hulu (KIM Surya Dirja)	2016
13	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	Pesantren "Al-Jihad"	2016
14	Jerenjang	Seberuang	Kantor Desa Jerenjang	2016
15	Bukuan	Seberuang	Kantor Desa Bekuan	2016
16	Piasak Hulu	Selimbau	Kantor Desa Piasak Hulu	2016
17	Titian Kuala	Selimbau	Kantor Desa Titian Kuala	2016
18	Bati	Sebruang	KIM "Piasak Info"	2017
19	Gerayau	Selimbau	Desa Grayu	2017
20	Seriang	Badau	KPH "Kesatuan Pengelola Hutan"	2017
21	Kandung Suli	Jongkong	Kantor Desa Kandung Suli	2018
22	Jongkong Kiri Hulu	Jongkong	Kantor Desa Jongking Kiri Hulu	2018
23	Entibab	Bunut Hilir	Kantor Desa Entibab	2018
24	Nanga Suhaid	Suhaid	Sekretariat KIM "Entungan"	2018
25	Nanga Suhaid	Suhaid	SMA Nanga Suhai	2018
26	Benuis	Selimbau	Kantor Desa Benuis	2018
27	Kelakar	Hulu Gurung	Kantor Desa Kelakar	2018
28	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	SMA N 1 Hulu Gurung	2018
29	Jongkong	Jongkong	SMA N 1 Jongkong	2019
30	Jongkong Kanan	Jongkong	MTs N 3 Jongkong	2019
31	Tepuai	Hulu Gurung	SMP N 2 Hulu Gurung	2019
32	Sejahtera Mandiri	Hulu Gurung	Kantor Desa Sejahtera Mandiri	2019
33	Bugang	Hulu Gurung	Kantor Desa Bugang	2019

34	Lubuk Antuk	Hulu Gurung	Kantor Desa Lubuk Antu	2019
35	Riampiang	Bunut Hulu	Kantor Desa Riam Piang	2019
36	Nanga Semangut	Bunut Hulu	Balai Desa Nanga Semangut	2019
37	Badau	Badau	BLC Kantor Camat Badau	2019
38	Bunut Hilir	Bunut Hilir	SMP N 1 Bunut Hilir	2019
39	Bunut Hilir	Bunut Hilir	SMP N 5 Bunut Hilir	2019
40	Tepuai	Hulu Gurung	SMK N Hulu Gurung	2019
41	Sendan	Batang Lupar	SMP N 1 Batang Lupar	2019
42	Lunsara	Putussibau Selatan	SMP N 9 Putussibau	2019
JUMLAH				42

5. Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam melaksanakan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu diperlukannya kerjasama dengan OPD terkait seperti salah satunya adalah dengan pembentukan Tim Penunjang (Admin) Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu di masing-masing OPD. Hal ini bertujuan agar pengumpulan data lebih mudah dan tidak ada terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian data. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Terlambatnya OPD mengembalikan Form Isian Data yang mengakibatkan keterlambatan dalam penginputan data.
- Data yang telah disampaikan masih ada masalah baik mengenai isi data maupun penjumlahan yang tidak sesuai dengan tahun sebelumnya sehingga perlu dilakukan verifikasi kembali.
- Jumlah Form yang terisi data tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan yang diminta
- Data yang dikumpulkan masih berupa Form Isian Data dan belum menggunakan aplikasi.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut perlunya sosialisasi terlebih dahulu tentang pemahaman dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu perlu mengoptimalkan setiap Tim Penunjang (Admin) pada masing-masing OPD agar dapat mengembalikan Form Isian Data tepat waktu dan saat melakukan verifikasi ulang terkait data yang tidak sesuai.

Serta perlu dirancang suatu aplikasi Data Statistik Sektoral yang dapat membantu pengumpulan dan penyusunan data agar lebih efektif dan efisien. Adapun data yang terkumpul sebanyak **23 OPD, 9 Instansi Vertikal** dan **2 BUMD**.

6. Sosialisasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

Penyelenggaraan statistik sektoral didasarkan pada kebutuhan data dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Data yang berkualitas sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Karena tuntutan pengguna data terhadap ketersediaan data dan informasi statistik sektoral semakin beragam dan berkualitas maka arah kebijakan data statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral yang lebih berkualitas, dalam memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), *mudah diakses (accessibility)*, serta *konsisten (coherent)* untuk mendukung terwujudnya satu data Kabupaten Kapuas Hulu dan Satu Data Indonesia dengan perumusan kebijakan yang lebih berbasis online. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di Kapuas Hulu memiliki data yang berbeda pada objek pendataan yang sama.
- b. Kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik sektoral masih terbatas
- c. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik sektoral terbatas
- d. Penyusunan data statistik sektoral belum memiliki standar data dan metadata baku yang telah ditetapkan

Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD tentang statistik sektoral dan tata cara penyelenggaraannya serta pentingnya statistik sektoral bagi pembangunan di daerah. Hasil keluaran kegiatan Sosialisasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu adalah memberi pemahaman pengetahuan mengenai Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu kepada penyelenggara OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak **40 peserta**.

7. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik

Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, permasalahan yang di hadapi pada tahun 2019 terletak pada kendala teknis media informasi dan komunikasi LPPL Rasika 103,4 FM. Pada bulan oktober 2019, LPPL Rasika berhenti beroperasi dikarenakan perangkat Booster, Composer dan Mixer telah rusak berat sehingga siaran Radio tidak dapat dilakukan. Tidak beroperasionalnya radio ini mengakibatkan konten informasi yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat pada wilayah desa/dusun tidak dapat diterima.

Pengadaan perangkat baru yang rusak, telah di anggarkan pada RKA/DPA Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun anggaran 2020.

8. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kegiatan dokumentasi pembagunan daerah merupakan rangkaian kegiatan pencarian informasi, pengolahan sampai dengan pendokumentasian dalam berbagai format (text, mp4, mp3 dan konten digital). Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah tenaga liputan dan pengolah hasil liputan sehingga

belum dapat menangani semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. Perangkat liputan dan pengolahan hasil liputan (memory, kamera, comcoder dan computer editing), yang terbatas dan beberapa perlu peremajaan;
- c. Operasional pembiayaan perjalanan tim liputan yang terbatas, sehingga tidak dapat menangani semua kegiatan yang telah terjadwal.

9. Kegiatan Pembinaan Program Desa Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan, monitoring dan evaluasi desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Kominfo RI adapun Daftar Desa / tempat yang mendapatkan Bantuan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 7

Data Media Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

NO	NAMA KIM	DESA	KECAMATAN
1	BUKIT BIRU	SEJIRAM	SEBERUANG
2	S A R I D A N	NANGA SEBINTANG	KALIS
3	SEKILAS INFO	TANJUNG JATI	PUTUSSIBAU SELATAN
4	DENGAH	TANJUNG KARANG	PUTUSSIBAU UTARA
5	NANDANG TEKALONG	TEKALONG	MENTEBAH
6	KETAM BERSATU	SUNGAI BESAR	BUNUT HULU



7	NANDANG PASULANG	TEKUDAK	KALIS
8	KEDAUANG MAHKOTA INFO	NIBUNG	SELIMBAU
9	SURA DIRJA	BUNUT HULU	BUNUT HILIR
10	PIASAK INFO	PIASAK HILIR	SELIMBAU
11	DANGONA BANUAKA	ULAK PAUK	EMBALOH HULU
12	PODI INFORMATIKA	MARTADANA	PENGKADAN
13.	AMSKER MANIA	HULU GURUNG	KELAKAR
14	AMPAN INFORMATIKA	PERMATA	PENGKADAN
15	MADU MANIS	NANGA LAUK	EMBALOH HILIR
16	ENTUNGAN HULU	NANGA SUHAID	SUHAID
17	JURNALIS WARGA PERBATASAN (JURAGAN)	PUTUSSIBAU KOTA	PUTUSSIBAU UTARA
18	TEBINGAK INFORMASI	DESA JONGKONG TANJUNG	JONGKONG
19	BERUNYAU PERMAI DIGITAL	DESA RIAM PIANG	BUNUT HULU
20	KABAN MAYAS	DESA MELEMBA	BATANG LUPAR

10. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Masyarakat melalui Sistem Informasi Layanan Publik

Sosialisasi terkait dengan keberadaan aplikasi LAPOR belum dilakukan pada wilayah kecamatan, sehingga data laporan yang masuk baru pada seputaran wilayah kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kalis dan sekitarnya. Aplikasi LAPOR di launching pada Tahun 2018 akhir, sehingga upaya sosialisasi di tahun 2018-2019 hanya sebatas pemberian informasi keberadaan LAPOR pada media – media elektronik dan soial. Sehingga, masyarakat di wilayah Kapuas Hulu yang belum memiliki akses internet yang baik, belum dapat menerima informasi ini dan belum dapat melakukan pendaftaran aplikasi dengan baik.

11. Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi

Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi merupakan operasional dari pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kendala uyang dihadapi pada kegiatan ini adalah :

- a. Belum tersedianya informasi yang dikecualikan, dimana jenis informasi ini harus disusun dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Informasi yang dikecualikan sudah dilakukan pada tahap awal, yaitu permintaan data informasi kepada seluruh OPD, namun belum mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Pemanfaatan aplikasi PPID yang belum optimal, hal ini terjadi karena aplikasi PPID yang digunakan merupakan aplikasi berbagi pakai dari Kementerian Dalam Negeri. Pada Tahun 2019, aplikasi ini mengalami beberapa penyempurnaan sehingga beberapa fungsi (khususnya disposisi antara PPID Utama dan PPID Pembantu) belum dapat



dilakukan. Namun pada Tahun 2020, PPID Utama akan melakukan penyegaran terhadap operator aplikasi PPID dan akan memberikan workshop terkait dengan fungsi disposisi pada aplikasi PPID tersebut.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Dengan tujuan ini Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- b. Meningkatkan kualitas data Statistik Lintas Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2017-2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik
- d. Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral.

Lebih jelas mengenai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sapik	-	CC	B	BB	BB	A
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	-	-	1,93	2,60	2,60	2,60
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	77	80	100%
2	Meningkatkan kualitas data statistik lintas sektoral kabupaten kapuas hulu	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	-	100%	100%	100%	100%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA.

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja setelah Perubahan sebagai berikut :



Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran E-gov	Indek SPBE	2,60
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	-
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama. Dengan demikian kinerja utama tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran E-gov	Indek SPBE	2,60	2,60	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77	100%

4	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100 %	100%	100%
---	---	---	-------	------	------

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kab. Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	1	-

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 3 (Tiga) dengan capaian 100% dan Belum Ada Nilai 1 (satu) Indikator kinerja hasil nilainya untuk Tahun 2019 belum keluar yaitu Predikat Sakip.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-

3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 4 (empat) sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 3 (Tiga) sasaran dengan capaian sebesar 100%.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik” bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Laporan Kinerja yang dilaksanakan Oleh Inspektorat daerah untuk Tahun 2019 belum keluar.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik” dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pada berbagai tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1
Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	%	BB	-	-
	Capaian sasaran (0%)				

Tabel 3.5
Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019		
		Tar get	Real isasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%
1.	Predikat SAKIP	-	-	-	CC	CC	100	B	BB	200	BB	-	-

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	Predikat SAKIP	A	-	-

Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini :

Indikator : Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi Inspektorat Tahun 2017 mendapat predikat CC sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian sasaran 100%.

Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu untuk Tahun 2018 menargetkan Predikat SAKIP B dan setelah Laporan hasil evaluasi SAKIP dengan Nomor : 700/246/INKAB/LHR/2019 pada tanggal 30 Juli 2019 mengeluarkan predikat SAKIP dengan hasil BB (72,90 poin).

Nilai BB ini mencerminkan bahwa Renstra yang disusun dengan baik, Akuntabel, indikator pencapaian kinerja yang jelas dan terukur, evaluasi atas program dan kinerja telah dilakukan, serta capaian target indikator juga tercapai.

Berdasarkan hasil nilai BB yang di peroleh, Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu untuk tahun 2019 menargetkan mempertahankan nilai BB dengan melengkapi kekurangan dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran E-gov

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat Presiden yaitu peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan penerapan SPBE diantaranya terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan.

Indikator : Indeks SPBE

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2018 memiliki nilai **indek SPBE 1,93** dengan predikat **CUKUP**. Sedangkan untuk tahun 2019 hasil evaluasi **Indeks SPBE** Kabupaten Kapuas Hulu mendapat **nilai 2,60** dengan predikat **BAIK** sesuai dengan target yang di inginkan (hasil Indeks SPBE Tahun 2019 terlampir).

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran “ Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public ” dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pada berbagai table di bawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3
Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	77	100
Capaian sasaran Berhasil (100%)					

Tabel 3.8
Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019		
		Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	100

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat baru pada Tahun 2019 dilaksanakan penilaian oleh Pihak Akademis PDD Politeknik Negeri Pontianak di Kab. Kapuas Hulu Bekerja sama dengan Bagian Organisasi Pemerintahan. dengan hasil nilai 77 predikat mutu pelayanan BAIK. Capaian tersebut dapat dilihat pada lampiran 5.

Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu yang disajikan sebagai data indikator dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan kegiatan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak guna keperluan analisis sebagai kegiatan lainnya, dimana data tersebut dihimpun dari berbagai lintas sektoral yang menyangkut aspek Fisik, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan yang disajikan dalam bentuk table maupun grafik.

Publikasi Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu tahun 2019 dapat dipergunakan oleh seluruh instansi untuk menyusun rencana pembangunan secara terintegrasi dan terkoordinasi di Kab. Kapuas Hulu sehingga arahan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara tepat, sesuai dan berkesinambungan.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya pengelolaan data statistik Lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada berbagai table di bawah ini:

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 4
Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	%	100%	100%	100%
	Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)				

Tabel 3.10
Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019		
		Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
1.	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar 100% dikategorikan “Sangat Berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini :

Indikator : Persentase data statistic sektoral Kab. Kapuas Hulu yang valid

Realisasi kinerja Indikator Persentase kompilasi ketersediaan data statistic lintas sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019 sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut sesuai dengan target yang di tetapkan sebesar 100%.

Realisasi kinerja indikator Persentase kompilasi ketersediaan data statistic lintas sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019 sama dengan realisasi kinerja tahun

2018 sebesar 100%. Adapun data yang terkumpul sebanyak **23 OPD, 9 Instansi Vertikal dan 2 BUMD.**

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 5.363.460.400,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.009.241.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.354.219.400,00. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 5.344.588.400,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.640.369.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.704.219.400,00.

Pada akhir tahun anggaran, APBD-P Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terealisasi sebesar Rp. 5.346.903.226,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.794.191.670,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.552.711.556,00.

Perubahan anggaran dari APBD ke APBD-P berkurang sebesar Rp. 18.872.000,00 (-0,35%) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan sebesar Rp. 368.872.000,00 (- 18,36%) dan Anggaran Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 350.000.000,00 (10,43 %).

Pada akhir Tahun Anggaran 2019 Persentase anggaran sebesar 97,38 %, persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 96,50 % dan Belanja Langsung sebesar 97,77%. Untuk Belanja Langsung Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 7 program dan 39 kegiatan.

1. Realisasi Belanja

a. Tidak Langsung

Realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	858.966.000	828.927.832	96.50
2	Tunjangan Keluarga	97.204.000	93,196,546.00	95.88
3	Tunjangan Jabatan	122.313.000	119.330.000	97.56
4	Tunjangan Fungsional	11.531.000	11.250.000	97,56
5	Tunjangan Fungsional Umum	16.615.000	15.840.000	95.34
6	Tunjangan Beras	51.887.000	49.752.540	95.89
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	1.700.000	1.658.021	97.53
8	Pembulatan Gaji	14.000	13.330	95.21
9	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD	480.139.000	463.000.000	96.43
	Total	1.640.369.000	1.582.968.269	96.50

b. Belanja Langsung

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Langsung

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.088.254.600	2.030.609.343	97.24
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000	8.400.000	100
2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	134.624.398	114.216.910	84.84
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.500.000	2.075.400	83.02
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	83.280.013	71.905.000	86.34



5	Penyediaan Jasa Pengamanan Dan Kebersihan Kantor	62.286.000	62.286.000	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.221.890	130.221.000	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.780.000	76.777.000	100
8	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	306.240.600	303.457.700	99.09
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	20.000.000	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	15.600.000	15.600.000	100
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	138.600.000	138.600.000	100
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	332.523.000	332.522.515	100
13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	252.800.000	252.800.000	100
14	Penyediaan Administrasi pengadaan barang dan jasa	13.200.000	13.200.000	100
15	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Skpd	15.000.000	15.000.000	100
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	289.200.000	289.200.000	100
17	Penyediaan Jasa Publikasi	10.800.000	10.800.000	100
18	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	35.000.000	35.000.000	100
19	Penyusunan RKA/DPA	8.020.000	8.020.000	100
20	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo se Kalbar	153.173.000	130.628.218	85.28
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.750.000	241.254.800	99.38
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	153.750.000	152.280.700	99.04
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	49.974.100	99.95
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.000.000	39.000.000	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.500.000	85.228.534	99.68
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	85.500.000	85.228.534	99.68
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.060.000	24.060.000	100



1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	8.020.000	8.020.000	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.020.000	8.020.000	100
3	Penyusunan rencana kerja SKPD	8.020.000	8.020.000	100
V	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	440.182.000	432.331.426	98.22
1	Dokumentasi kegiatan pembangunan daerah	101.154.000	99.456.720	98.32
2	Penyediaan Layanan Informasi Dokumentasi	109.163.000	104.582.204	95.80
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik	119.708.000	119.336.402	99.69
4	Pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	58.554.000	58.544.000	99.98
5	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Masyarakat Melalui Sistem Informasi Layanan Publik	51.603.000	50.412.100	97.69
VI	Program Pengembangan Data dan Informasi	197.386.300	192.999.920	97.78
1	Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu	136.666.800	133.961.600	98.02
2	Sosialisasi Satu Data Sektoral Kab. Kapuas Hulu	60.719.500	89.038.320	97.23
VII	Program Aplikasi Informatika	626.086.500	614.986.914	98.23
1	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) e-Government Kab. Kapuas Hulu	85.563.000	83.337.926	97.28
2	Pengelolaan dan pengembangan website Kab. Kapuas Hulu	102.726.500	102.222.465	99.51
3	Pendampingan dan fasilitasi bantuan program KPU/USO	103.310.000	99.158.367	95.98
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan SPBE	250.000.000	248.836.500	99.53
5	Bimbingan Teknis Aplikasi Simantra	71.487.000	68.531.656	95.87
6	Launching Gedung Media Center dan Internet Gratis Dinas Kominfo dan Statistik	13.000.000	13.000.000	100

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakip	BB	-	-	32.080.000	32.080.000	100%	-
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	2,60	2,60	100 %	85.563.000	83.237.926	97,28%	2,72%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77	100 %	51.603.000	50.412.100	97,69%	2,31%
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%	100%	100%	136.666.800	133.961.600	98,02%	1,98%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil/SDM serta sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Salah satu keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2019 kembali mendapatkan penghargaan sebagai **Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat** (terlampir) dan mendapat nilai **Indeks SPBE 2,60** dengan predikat **BAIK** (terlampir).

Secara umum, seluruh target dari setiap sasaran strategis yang dijabarkan dalam IKU telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019. Selain itu capaian tahun 2019 merupakan pondasi awal dalam rangka mencapai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017-2021. Realisasi target ini juga diikuti oleh keberhasilan realisasi anggaran yang rata-rata 97,38%.

Hasil capaian kinerja tersebut sudah merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Perjanjian kinerja pada tahun 2019 merupakan faktor pendorong yang akan dijadikan sebagai acuan keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi pencapaian visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kapuas Hulu yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”*** sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya akan lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun-tahun berjalan. Capaian kinerja 2019 juga sudah sejalan dengan target prioritas



pembangunan, hal ini dapat dilihat dari dukungan hasil kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2019.



Lampiran 1

**Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	2,60	2,60	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77	100%
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					100%

Paussibau, 28 Januari 2020
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu,



Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19650507 199803 1 006



Lampiran 2



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ISTIWA, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : A.M. NASIR, SH.

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 23 Januari 2020



PIHAK KEDUA,

A.M. NASIR, SH.



PIHAK PERTAMA,

Ir. ISTIWA, M.Si.

NIP. 19650507 199803 1 006



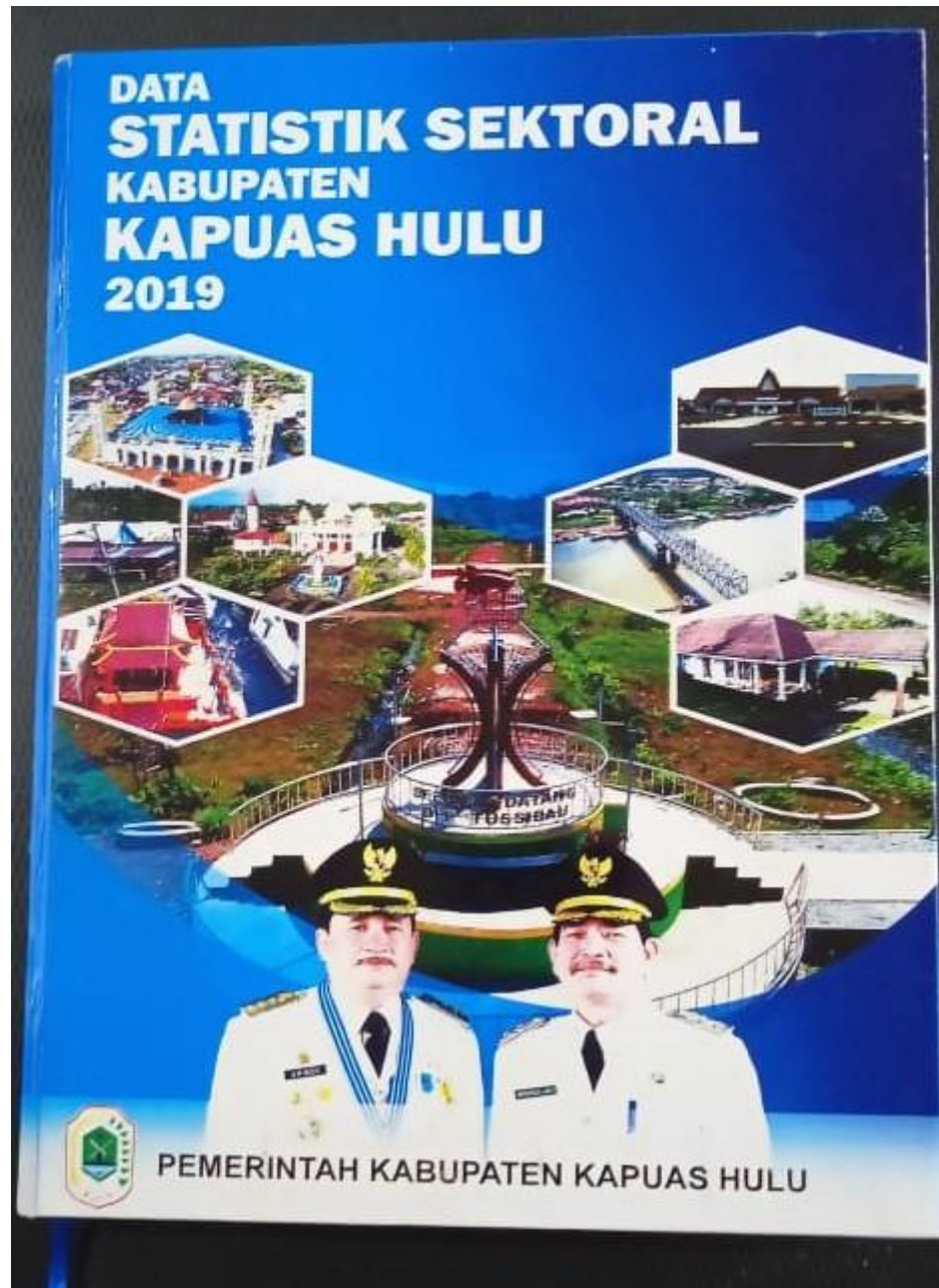
Lampiran 4

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019



Lampiran 3

Buku Data Statistik Sektorial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019





Lampiran 5

Hasil Penilaian IKM dari Pihak Akademis PDD Politeknik Negeri Pontianak di Kab. Kapuas Hulu Bekerja sama dengan Bagian Organisasi Pemerintahan.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik				
Kode Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3.0000	0.3333	C
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3.0169	0.3352	C
U3	Waktu Penyelesaian	2.8983	0.3220	C
U4	Biaya / Tarif	2.9492	0.3277	C
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2.9322	0.3220	C
U6	Kompetensi Pelaksana	3.3898	0.3766	B
U7	Perilaku Pelaksana	3.3220	0.3766	B
U8	Penanganan Pengaduan, Saran	3.0678	0.3409	B
U9	Sarana & Prasarana	3.1864	0.3540	B
Jumlah		27.7288	3.0810	
Nilai Konversi		BAIK	77.0245	BAIK

HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

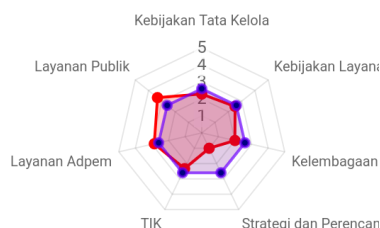
Home > Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 > Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Lampiran 6

NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK

Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

- Aspek SPBE Target
- Aspek SPBE Indeks



Nama Instansi
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

K/L/D : Kabupaten
Daerah : Kalimantan
Indeks SPBE : 2.6
Predikat SPBE : Baik

Domain Kebijakan SPBE : 2.41

→ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 2.29
→ Kebijakan Layanan SPBE : 2.5

Domain Tata Kelola : 1.86

→ Kelembagaan : 2.00
→ Strategi dan Perencanaan : 1.00
→ TIK : 2.33

Domain Layanan SPBE : 3.03

→ Administrasi Pemerintahan : 2.86
→ Pelayanan Publik : 3.33

INSTANSI YANG BERSANGKUTAN BERSEDIA INDEKSNYA DIPUBLIKASI



PINDAI BARCODE

"Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi"

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi